



## **A. Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Dasar 1945 alinea ke-4 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan Nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu bidang strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu pembangunan bidang kesehatan harus ditunjang secara sinergis oleh pembangunan bidang-bidang lain. Atas dasar ini pula, pemerintah telah menetapkan wawasan kesehatan sebagai asas pokok program dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian partisipasi dan kerjasama lintas sektoral mutlak diperlukan untuk mewujudkan upaya peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat, hal karena pembangunan kesehatan merupakan hak dasar manusia.

Masalah kesehatan harus dipahami sebagai investasi dan menjadi tanggungjawab bersama agar mewujudkan masa depan Kabupaten Pasuruan yang sehat dan berkualitas, kesadaran seluruh pihak merupakan kunci utama, sebab sumberdaya kesehatan sesungguhnya hanya bagian kecil dari sistem pembangunan kesehatan. Dengan memandang kesehatan sebagai investasi,

maka setiap program pembangunan yang terkait harus memberikan kontribusi yang positif.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan perkapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016, yang berisi visi, misi, serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Pasuruan yaitu “ **Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat** “

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai instansi teknis mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok fungsi instansi Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah serta Peraturan Bupati (Perbup) nomor 40 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pasuruan dengan berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada maka ditetapkan rencana strategi instansi Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Teknis Program dan Kegiatan.

Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan merupakan langkah awal dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dan akan

dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kesehatan menjadi salah satu aspek dasar dalam penyusunan LAKIP Tahun 2016, penyusunan berdasarkan pada indikator (Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tatacara pelaporannya. Oleh karena Maksud dan tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan tahun 2016 ini adalah :

1. LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
2. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Adapun Laporan ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2016.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (performance improvement) di masa yang akan datang.

### **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2015 adalah:

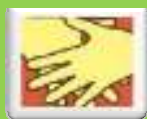
1. Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri PAN RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

- I. **Pendahuluan**
    - A. Latar belakang
    - B. Maksud dan Tujuan
    - C. Landasan Hukum
  - II. **Perencanaan Kinerja**

Penetapan Kinerja Tahun 2016
  - III. **Akuntabilitas Kinerja**
    - A. Pengukuran Kinerja
    - B. Evaluasi Kinerja
  - IV. **Penutup**
- Lampiran

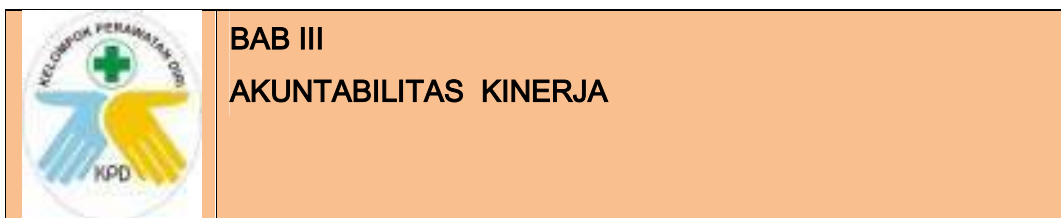


## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### Penetapan / Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan Satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan disesuaikan dengan hasil revisi pada saat evaluasi dengan Tim Kementerian PAN dan RB yang diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2015	TARGET 2016	
1	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya kuratif dengan mengutamakan promotif dan preventif	1	Angka kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)	9,60	9,80
			2	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	102,00	102,00
			3	Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0,06
			4	Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%)	90	85
			5	Angka penemuan kasus TB Paru semua tipe. (%)	90	85
			6	Angka Kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue	44	47
			7	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan (%)	70	70
			8	Rumah Tangga / KK yang menggunakan jamban sehat. (%)	70	65
2	meningkatnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	1	Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)	49	46
			2	Desa Siaga Aktif (%)	90	90
3	meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesh	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan	1	Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas	75	70



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan Kesehatan dan Kabupaten Pasuruan selama tahun 2016 ini sudah mewujudkan misi dan tujuan Dinas Kesehatan dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator sasaran penetapan kinerja yang sudah disepakati dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET2 016	REALISASI 2016	REALISASI 2015
1	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya kuratif dengan mengutamakan promotif dan preventif	1 Angka kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)	9,60	6,81	7.73
			2 Angka Kematian Ibu ( AKI) (per 100.000 KH)	102,00	91.62	101,47
			3 Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0.05	0.06
			4 Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%)	90	91.67	95.83
			5 Angka penemuan kasus TB Paru semua tipe. (%)	90	77.30	57
			6 Angka Kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue	44	47.94	43.37
			7 Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan (%)	70	67.83	71.92
			8 Rumah Tangga / KK yang menggunakan jamban sehat. (%)	70	68.75	65.39
2	meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	1 Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)	49	44.45	42.62
			2 Desa Siaga Aktif (%)	90	98.63	98.63
3	meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesh	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan	1 Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas	75	80.95	78.91

## **B. EVALUASI KINERJA**

Dari hasil realisasi indikator penetapan kinerja , ada beberapa indikator yang belum tercapai . Evaluasi kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

### **A.1. CAPAIAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

#### **a. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Target dari Pemerintah yang juga menjadi target MDGs, Angka Kematian Bayi dapat ditekan menjadi 23 per 1.000 Kelahiran Hidup pada akhir tahun 2015, selanjutnya target Angka Kematian Bayi diteruskan SDGs harus dibawah 12 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu.

Angka Kematian Bayi Kabupaten Pasuruantahun 2016 tercapai sebesar 6,81 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini mengalami penurunan 0,92 jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 7,73 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari target RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 8,50 per 1.000 kelahiran hidup maka pencapaian tahun 2016 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Jumlah kematian bayi tahun 2016 sebanyak 171 kasus. Penyebab kematian terbesar adalah karena asfiksia sebanyak 58 kasus (33.92%), BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) sebanyak 32 kasus (18.75%), kelainan kongenital bawaan sejumlah 31 kasus, penyebab kematian karena infeksi sebanyak 29 kasus, pneumonia ada 4 kasus, meningitis ada 3 kasus, trauma 2 kasus , TBC ada 2 kasus, aspirasi ada 2 kasus, diare ada 1 kasus dan penyebab lainnya ada 7 kasus.

Penyebab kematian bayi terbanyak karena asfiksia, disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan asfiksia oleh bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kompetensi pada bidan dan juga perlu adanya komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil, maka perlu adanya jejaring dengan RSUD Bangil agar bayi asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil. Sedangkan kasus BBLR ini bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi tersebut apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas serta ibu hamil tersebut selalu mendapatkan penyuluhan. Penolong persalinan terbanyak masih ditolong oleh bidan sebanyak 58 kasus (33.92%), oleh dokter 111 kasus (64.91%) dan untuk persalinan yang ditolong dukun sebanyak 2 kasus (1.17%). Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 99.44% dari target 99%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai target tetapi masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Dari 171 bayi yang meninggal, sebanyak 90 (52.63%) kasus kematian terjadi di RSUD Bangil, 22 (12.86%) kasus kematian terjadi di RSSA Malang, 5 (2.92%) Kasus kematian di Puskesmas, 8 kasus (4.63 %) kematian terjadi di Rumah Sakit Kota Pasuruan, 30 kasus kematian terjadi di Rumah Sakit lainnya, 11 kasus kematian bayi terjadi di rumah, 2 kasus kematian terjadi di Bidan praktek dan 3 kasus kematian bayi terjadi di perjalanan. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

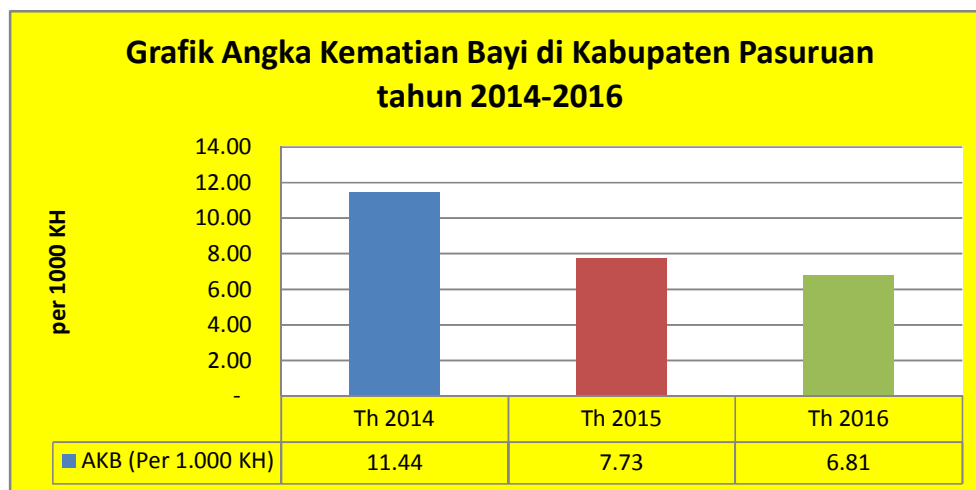
Tabel 1. Jumlah Kematian Bayi dan Kelahiran Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2014-2016

Tahun	Jml Kematian	Kelahiran Hidup	AKB (Per 1.000 KH)
Th 2014	298	26,055	11.44



Th 2015	198	25,624	7.73
Th 2016	171	25,104	6.81
Target RPJMD			< 9.8

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Gambar1



Gambar 1  
Sumber : Laporan Bidang Yankes

Upaya yang dilakukan dan akan terus ditingkatkan kualitasnya untuk menekan angka kematian bayi adalah:

- Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) anak
- Pelatihan Asfiksi
- Pelatihan Berat Badan Lahir Rendah
- Pertemuan penanganan pra rujukan pada neonatal resiko tinggi
- Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi
- Audit Maternal Perinatal
- Supervisi supportive
- Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu
- Drill emergency kegawatdaruratan Neonatal di Puskesmas

## **b. Angka kematian Ibu melahirkan**

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu yang diperoleh dengan perhitungan jumlah kasus kematian ibu dibanding dengan jumlah kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) nasional (SDKI tahun 2003) sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Maksimal menurut MDGs adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 sebesar 91,61 per 100.000 kelahiran hidup (23 kasus) atau mengalami penurunan jika dibanding tahun 2015 sebesar 101,46 per 100.000 kelahiran hidup (26 kasus), atau mengalami penurunan sebesar 6 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 (103.5 per 100.000 kelahiran hidup) maka pencapaian tahun 2015 sudah dibawah target yang telah ditetapkan. Penurunan Angka Kematian Ibu dari tahun 2015 ke 2016 ini diakibatkan adanya :

### **1) Penyebab Kematian**

Dari sejumlah kematian ibu sebanyak 23 orang, 10 (43,47 %) orang dikarenakan pendarahan, sebanyak 2 (8.69 %) orang dikarenakan keracunan kehamilan (pre eklamsi berat), embaoli ketuban 2 orang dan penyebab lainnya adalah jantung, gagal nafas, gagal jantung, HIV, TBC, kanker mama sebanyak 9 orang. Keracunan kehamilan dapat diketahui selama kehamilan, sehingga apabila kualitas pemeriksaan kehamilan baik maka dapat terdeteksi jika ada gejala Pre Eklamsi dan Eklamsi. Saat ini kualitas ANC (Ante Natal Care) / Pemeriksaan Kehamilan lebih baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan ibu hamil yang seharusnya diperiksa 4 kali (K4) sudah mencapai 92.32 % walaupun belum mencapai targetnya 95%. Pemeriksaan (K4) yang berkualitas adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin, pada trimester 1 sebanyak 1 kali, pada trimester 2 sebanyak 1 kali dan pada trimester 3 sebanyak 2 kali.

### **2) Penolong Persalinan**

Berdasarkan penolong persalinan, dari 23 kematian ibu hamil bersalin dan nifas diantaranya 12 (52%) ditolong oleh Dokter Spesialis Kandungan, 10 (43 %) orang ditolong oleh Bidan dan 1 orang ditolong oleh dukun bayi.

Hal ini sebenarnya bila bidan mendapatkan pasien komplikasi dengan penyakit, para bidan langsung memberikan rujukan kepada Dokter Spesialis Kandungan, namun para pasien tersebut terlambat memutuskan untuk mau dirujuk. Untuk mengatasi hal tersebut harus ada komunikasi antara bidan dan dokter spesialis kandungan agar sebelum dirujuk sudah dilakukan pertolongan awal serta adanya sistem jejaring rujukan antara bidan, Puskesmas Poned dan RSUD dengan menggunakan *si jari emas*.

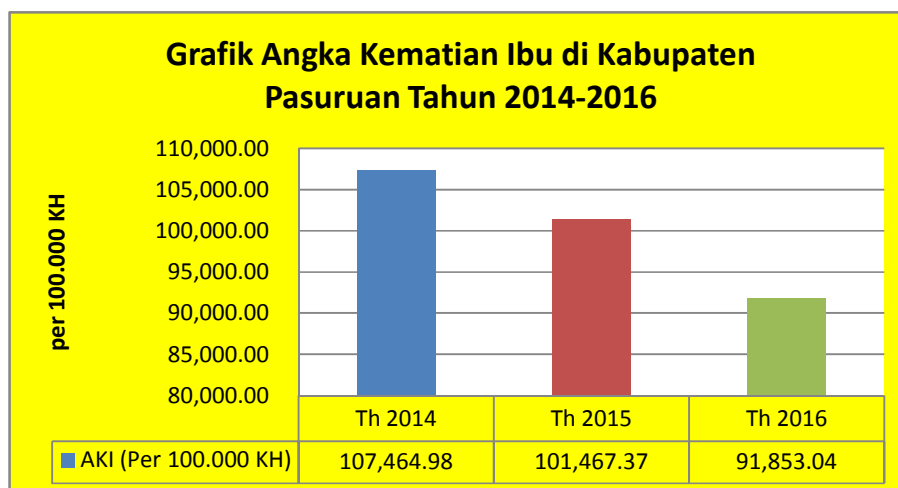
### 3) Tempat Kematian

Berdasarkan tempat kematian ibu bersalin, maka sebanyak 7 orang ibu bersalin meninggal di RSUD Bangil, 3 orang di perjalanan, 2 di RS. Dr. Soetomo, 1 orang di rumah, RS Sidoarjo 23, di Puskesmas 1, RS Probolinggo 1 dan di RS Saiful Anwar Malang 3, RSUD dr. Soedarsono 3, RS Masyitoh 1. Melihat beberapa kasus yang terjadi maka Rujukan kasus ke tempat rujukan lanjutan harus lebih ditingkatkan serta rujukan berjenjang menggunakan *si jari emas* harus di jalankan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien.

Tabel 2. Jumlah Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2014-2016

Tahun	Jml Kematian	Kelahiran Hidup	AKI (Per 100.000 KH)
Th 2014	28	26,055	107.46
Th 2015	26	25,624	101.47
Th 2016	23	25,104	91.62
Target RPJMD			< 102

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 2014-2016 dapat dilihat gambar 2



Gambar 2

Sumber : Laporan Bidang Yankes

Kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan adalah:

- 1) Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu
- 2) Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
- 3) Pelaksanaan Program Emas (Expanding Maternal and Neonatal Survival).
- 4) Pertemuan kader KIBBLA
- 5) Audit Maternal Perinatal
- 6) Pengembangan P4K bagi mitra terkait
- 7) Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu
- 8) Supervisi fasilitatif
- 9) Pelatihan APN
- 10) Pelatihan Kelas ibu hamil
- 11) Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA).
- 12) Drill emergency kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas

13)Pelayanan ANC Terpadu .

14)Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi Posyandu

**c. Persentase balita dengan gizi buruk**

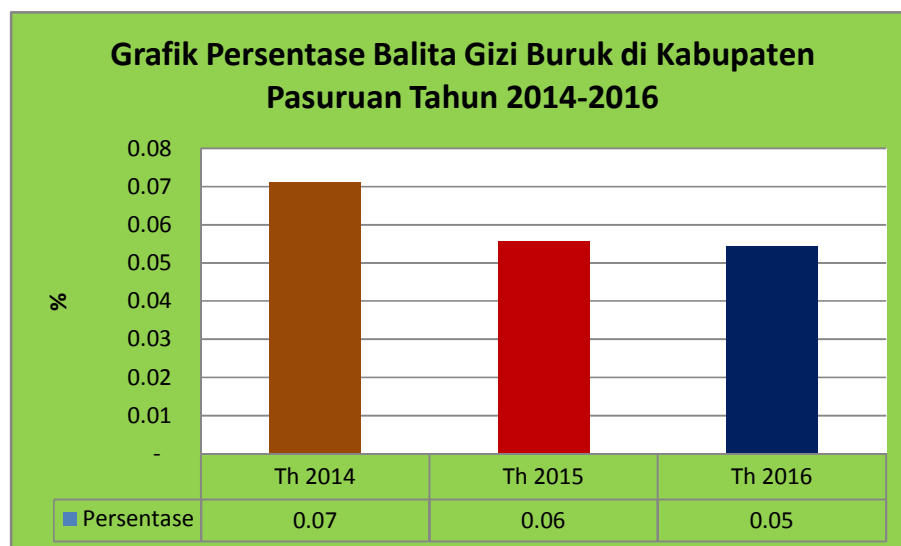
Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0.07% atau 73 balita dari 91.616 balita yang diperiksa di Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2015 sebesar 0,06% atau 66 balita dari 12.1782 balita yang diperiksa mengalami kenaikan sebesar 0.01%. Capaian ini masih dibawah target Nasional yaitu < 5%. Penurunan kasus kejadian gizi buruk dari tahun 2015 ke 2016 tersebut dikarenakan:

- a. Meningkatnya Kegiatan Surveylans Gizi sehingga lebih banyak kasus yang ditemukan secara dini.
- b. Meningkatnya kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- c. CSR untuk kewaspadaan dini.
- d. Adanya dukungan dana pemantauan gizi buruk.

Tabel 3. Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan tahun 2014-2016

Tahun	Balita Gizi Buruk	Jml Balita	Persentase
Th 2014	68	95693	0,07
Th 2015	68	121781	0,06
Th 2016	66	121782	0,05
Target			0.06

Persentase Balita dengan Gizi Buruk tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar.3.



Gambar 3

Sumber : Laporan Bidang Yankes

Upaya – upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan adalah melalui :

- a. Pertemuan lintas program dan lintas sektor program gizi.
- b. Pemberian Makanan Tambahan – Pemulihan (PMT-P) kepada balita dan bumil KEK (ibu hamil Kekurangan Energi Kronis).
- c. Penyuluhan gizi menggunakan dana BOK.
- d. Evaluasi program gizi di Puskesmas secara rutin.
- e. Pemetaan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi).
- f. Pemetaan Kecamatan Rawan Gizi.
- g. Pemetaan Desa Rawan Gizi.
- h. Pembentukan kelompok pendukung ASI
- i. Surveilans Gizi dalam rangka kewaspadaan dini terhadap kasus gizi buruk

## A.2. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

### a. Kecamatan Bebas Rawan Gizi

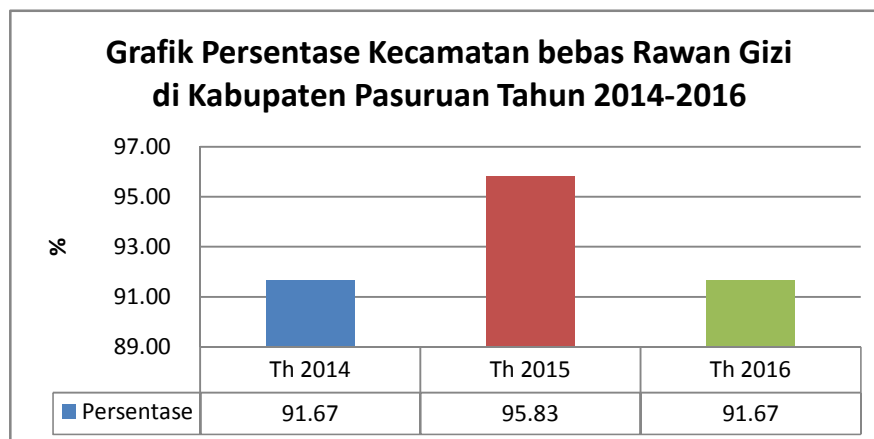
Indikator ini menggambarkan bahwa kecamatan harus mempunyai pemetaan kasus gizi buruk sehingga dapat diketahui sedini mungkin tersangka kasus gizi buruk . Dari target 85 % tahun 2016 mencapai 91.67 % , hal ini menunjukkan trend penurunan jumlah kecamatan yang bebas rawan gizi .

Perkembangan kegiatan tahun 2014 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Kecamatan Rawan Gizi Kabupaten Pasuruan tahun 2014-2016

Tahun	Bebas rawan gizi	jml. Kec	Persentase
Th 2014	22	24	91,67
Th 2015	23	24	95,83
Th 2016	22	24	91.67
Target			85,00

Persentase Balita dengan Gizi Buruk tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar.4.



Gambar 4  
Sumber : Laporan Bidang Yankes

Jumlah kecamatan bebas rawan gizi meningkat karena :

- KEP total terdiri dari gizi kurang (mulai dari pita kuning sampai garis merah pada KMS) dan gizi buruk (mulai dibawah garis merah pada KMS, marasmus dan kwashiorkor).
- Berkurangnya kasus gizi buruk pada balita

Upaya – upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi gizi kurang dan gizi buruk adalah :

1. Pemberian MP-ASI untuk Keluarga Miskin (Gakin) usia 6 – 24 bulan.
2. PMT pemulihan untuk balita gizi buruk.
3. PMT Ibu Hamil KEK.
4. Peningkatan penyuluhan gizi di posyandu.
5. Demo makanan padat gizi dan gizi seimbang.
6. Koordinasi dengan tim pangan & gizi dan dewan ketahanan pangan
7. Pemetaan kecamatan rawan gizi
8. Audit gizi di kecamatan rawan gizi

**b. Angka penemuan kasus TB Paru semua tipe**

Capaian penemuan dan penanganan TBC hanya 56,53 %, target 62,55 %, masalahnya belum semua fasilitas pelayanan kesehatan terutama swasta dan Dokter Praktek Swasta melaksanakan pengobatan sesuai program. Selain itu masih banyak penduduk Kabupaten Pasuruan yang melakukan pengobatan di wilayah kota dan YPP (Yayasan Pengobatan Paru).

beberapa faktor yang mendukung untuk kasus TB Paru yang ditemukan dan diobati khususnya di Puskesmas antara lain :

1. Semua Puskesmas (100%) telah menerapkan standart DOTS dalam pengobatan TB sesuai dengan Internasional Standart for TB Care (ISTC)
2. Pelaksanaan jejaring antar UPK (Unit Pelaksana Kesehatan) dalam pengobatan TB semakin optimal
3. Pasien TB dalam minum obat paket TB selama 6 bulan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut tabel perkembangan penemuan kasus TBParu di Kabupaten Pasuruan periode tahun 2014-2016 pada tabel 5 :

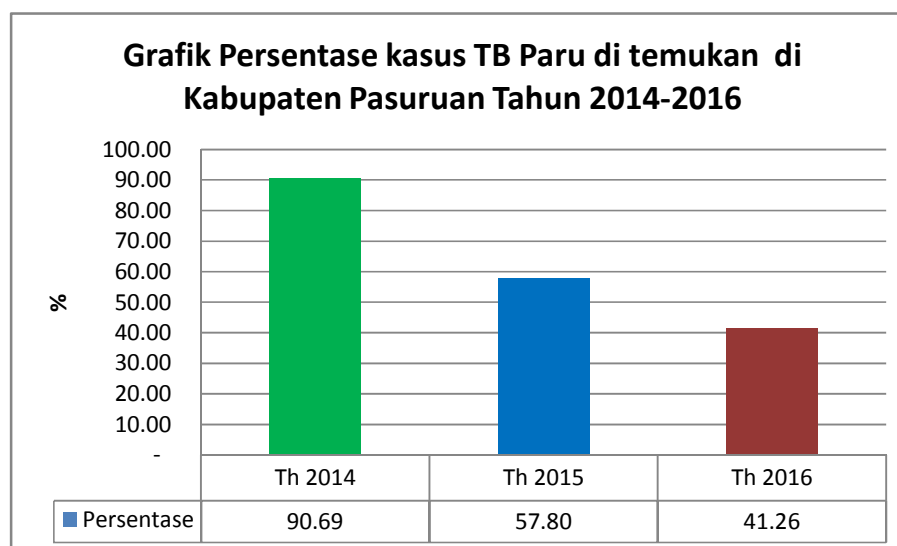
Tabel 5. Persentase penemuan kasus TB Paru di Kabupaten Pasuruan tahun 2014-2016

Tahun	kasus ditemukan	perkiraan jml kasus	Persentase
	886	977	90.69



Th 2014			
Th 2015	1,693	2,929	57.80
Th 2016	2.193	5,315	41.26
Target			85.00

Persentase penemuan kasus TB Paru di Kabupaten Pasuruan tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar.5.



Gambar 5  
Sumber : Laporan Bidang PMK

### c. Angka Kejadian penyakit Demam Berdarah dengue

Capaian angka kesakitan DBD tahun 2016 sebesar 47,94 per 100.000 jiwa. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 43,37 per 100.000 jiwa. Capaian tahun 2016 untuk memenuhi angka yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yaitu sebesar <47 per 100.000. Kabupaten Pasuruan merupakan daerah potensial endemis DBD. Dengan indikator tersebut, meskipun angka kesakitan masih dibawah SPM, tapi pada 2016 kasus DBD masih dalam kategori KLB. Guna menanggulangi KLB DBD tersebut pada tahun 2016 dilaksanakan program GEMAS DARLING (Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Lingkungan), yaitu

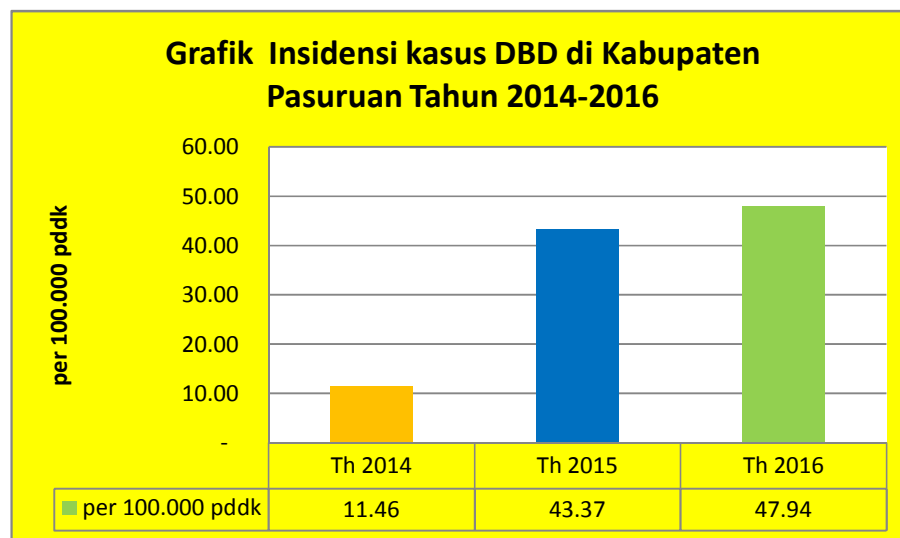
gerakan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan guna pencegahan penyakit berbasis kemandirian masyarakat melalui PHBS, kesehatan lingkungan dan kearifan lokal.

Indikator ini menggambarkan bahwa penderita penyakit demam berdarah dengue yang menyerang masyarakat dinilai dalam bentuk kejadian per 100.000 penduduk. Batas maksimal angka kesakitan DBD yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan adalah 50 orang per 100.000 penduduk khusus untuk daerah endemis.

Tabel 6. Insidensi Rate Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2014-2016 di Kabupaten Pasuruan

Tahun	jml kasus	jml Penduduk	per 100.000 pddk
Th 2014	180	1,570,699	11.46
Th 2015	686	1,581,787	43.37
Th 2016	764	1,593,683	47.94
Target			< 47

Insidensi Rate Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 6  
Sumber : Laporan Bidang PMK

Angka kesakitan DBD tahun 2016 naik dibandingkan tahun 2015 dikarenakan :

- 1) Pola musiman 5 tahunan penyakit Demam Berdarah Dengue, secara epidemiologi penyakit DBD ini akan mengalami peningkatan kasus seiring dengan musim iklim, dan ini terjadi di wilayah Jawa Timur.
- 2) Sosialisasi kewaspadaan dini pencegahan penyakit DBD pada musim pancaroba mulai berjalan efektif.
- 3) Respon penanggulangan focus DBD oleh petugas Puskesmas berjalan baik.
- 4) Adanya jejaring layanan rujukan penderita berjalan baik sehingga diagnosanya cepat.

**d. Kualitas Air Bersih Memenuhi syarat kesehatan**

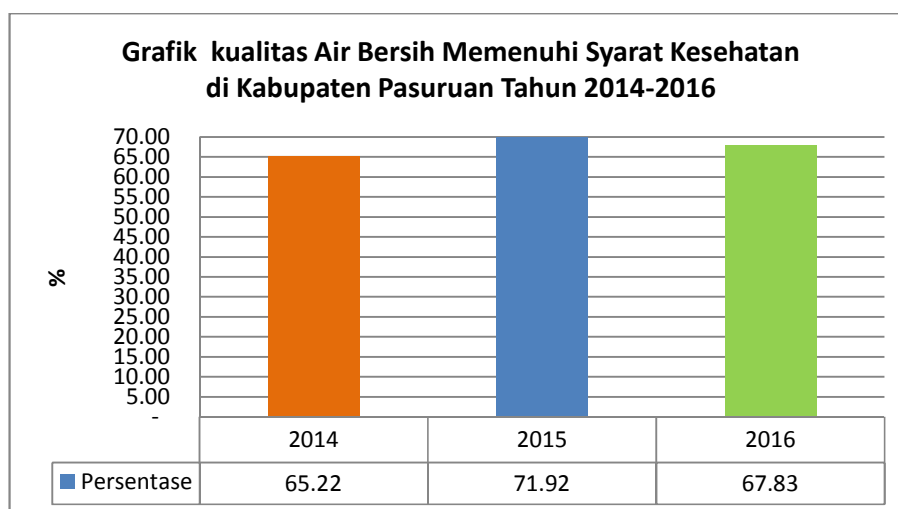
Berdasarkan Permenkes RI Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan di tahun 2016 dalam meningkatkan kualitas air bersih adalah melalui penyuluhan dan inspeksi sarana air bersih melalui puskesmas yang berada di wilayah kecamatan. Selain meningkatkan kualitas, kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kualitas air bersih yang dipakai juga ditingkatkan, hal tersebut dibuktikan dari jumlah sampel yang diperiksa secara internal dan external sejumlah 631 sampel.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan kualitas air bersih tahun 2016, dari jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 631 sampel yang memenuhi syarat sebanyak 428 sampel baik parameter bakteriologi dan kimia. Dilihat dari data diatas sebanyak 67,83% sampel yang diperiksa memenuhi syarat, akan tetapi belum memenuhi target yang adanyaitu 70%. Meskipun tidak memenuhi target, terdapat peningkatan dari jumlah sampel yang diperiksa dan jumlah sampel diperiksa memenuhi persyaratan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun data sampel yang diperiksa dan memenuhi syarat dari tahun 2014 hingga tahun 2016 ditampilkan pada table dan grafik di bawahini.

Tabel 7. jumlah sampel air bersih diperiksa dan memenuhi syarat Tahun 2014-2016

TAHUN	JUMLAH SAMPEL DIPERIKSA	SAMPEL DIPERIKSA MEMENUHI SYARAT	PERSENTASE (%)
2014	135	207	65,22
2015	187	260	71,92
2016	631	428	67,83

Grafik Sampel Air Bersih Diperiksa & Memenuhi Syarat



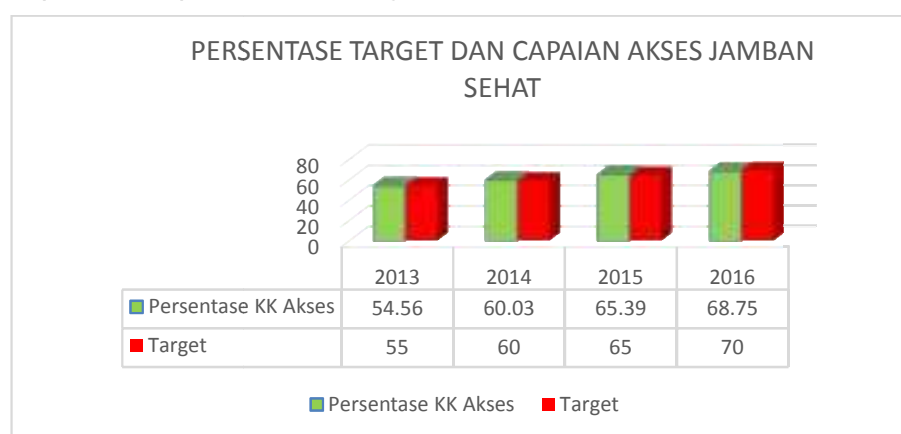
Gambar 7  
Sumber : Laporan Bidang PMK

**e. RumahTangga / KK yang menggunakan Jamban Sehat**

Kegiatan peningkatan akses sanitasi yaitu akses rumah tangga terhadap jamban sehat terus ditingkatkan dari tahun ketahun dengan kerjasama lintas sektor dan program. Pada tahun 2016 akses KK yang menggunakan atau mengakses jamban sehat meningkat menjadi 68,75% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 65,39%. Jumlah KK pengguna atau yang mengakses jamban sehat juga mengalami peningkatan dari trend KK di tahun sebelumnya pada 2015 sebanyak

280.177 KK sedangkantahun 2016 terdapat penambahan yang meningkat yaitu sejumlah 299.164 KK.

Peningkatan jumlah KK diatas terjadi karena terjalin kerjasama antara Dinas terkait di bidang sanitasi yang mulai terarah dalam program peningkatan akses sanitasi. Beberapa program terkait peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Pasuruan antara lain STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), dan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman). Beberapa program tersebut diatas tidak dapat berjalan sendiri tanpa kerjasama dan koordinasi dengan Dinas terkait, kemajuan program di tahun 2016 juga didukung dengan terbitnya Instruksi Bupati Pasuruan Nomor : 188/2/HK/424.013/2015 Tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Pasuruan Melalui GerakanTerpadu “Ayo Nggawe WC”. Adapun pencapaian akses sanitasi dapat dilihat pada table dan grafik dibawah ini.



Gambar 8  
Sumber : Laporan Bidang PMK

Berdasarkan data diatas, target di tahun 2016 belum tercapai, hal tersebut dikarenakan masih perlunya implementasi Instruksi Bupati diatas, dan belum tertibnya pelaporan akses jamban sehat oleh sanitarian puskesmas. Selain hal diatas prioritas pembiayaan masyarakat terhadap sanitasi sehat

dan layak masih kurang juga kurang besarnya pihak swasta dalam mengalokasikan CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap peningkatan akses sanitasi di wilayah sekitar perusahaan. Berdasarkan data yang ada CSR perusahaan yang berpihak terhadap peningkatan sanitasi hanya dilakukan oleh sedikit perusahaan antara lain PT. Tirta Investama Cabang Kebon Candi dan Winongan, PT. Amerta Indah Otsuka, PT. PGN, dan Nestle Kejayan. Bila pembiayaan sanitasi untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan tidak ditanggung bersama baik pemerintah Kabupaten, Desa dan Perusahaan swastamaka target Universal Akses terhadap sanitasi layak yaitu 100 % di tahun 2019 tidak akan tercapai

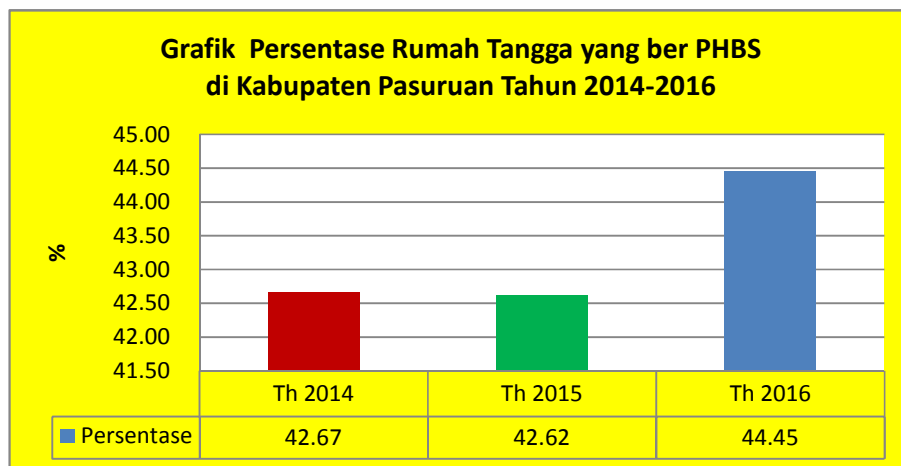
**f. Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Persentase Rumah Tangga Sehat Tahun 2016 sebesar 44,45 % (23,614 KK), dibandingkan Tahun 2015 sebesar 42,65 % (16,104 KK) capaiannya meningkat, hal ini disebabkan sudah adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Namun masih belum memenuhi target .

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tahun 2014-2016 di Kabupaten Pasuruan

Tahun	RT yg ber PHBS	Jml RT / KK di survei	Persentase
Th 2014	17,702	41,489	42.67
Th 2015	16,104	37,782	42.62
Th 2016	23.614	53.124	44.45
Target			49.00

Persentase Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 9  
Sumber : Laporan Bidang PSDM

#### g. Desa Siaga Aktif

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong.

Sedangkan dikatakan Desa Siaga Aktif adalah Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

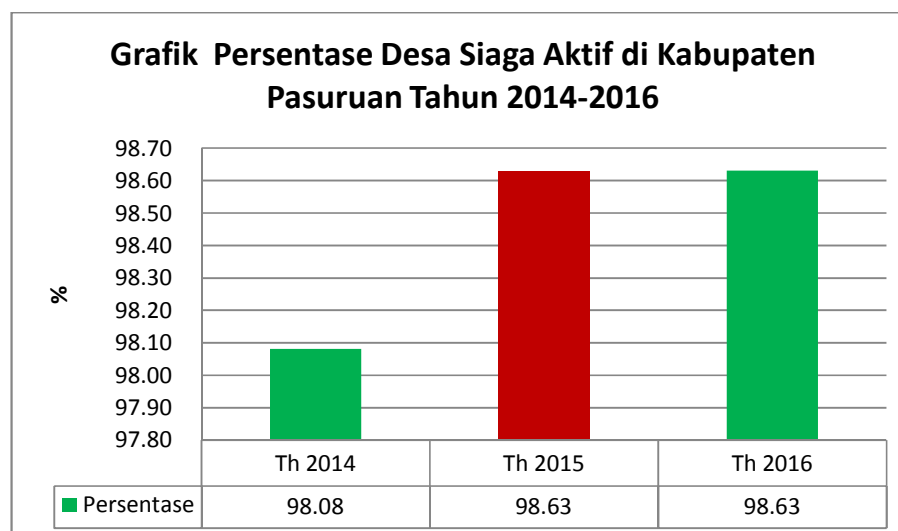
Di Kabupaten Pasuruan jumlah desa siaga aktif yaitu tahun pada tahun 2016 tercapai 98,63 % dibandingkan ditahun 2015 capaiannya tetap yaitu

98,63 %, sedangkan target yang ditentukan sebesar 90 %. Hal ini menunjukkan tercapainya program desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 10. Persentase Desa siaga aktif tahun 2014-2016 di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Desa siaga aktif	Jml Desa	Persentase
Th 2014	358	365	98.08
Th 2015	360	365	98.63
Th 2016	360	365	98.63
Target			90.00

Persentase Desa siaga aktif dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 10  
Sumber : Laporan Bidang PSDM

**h. Rata-rata Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan**

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan



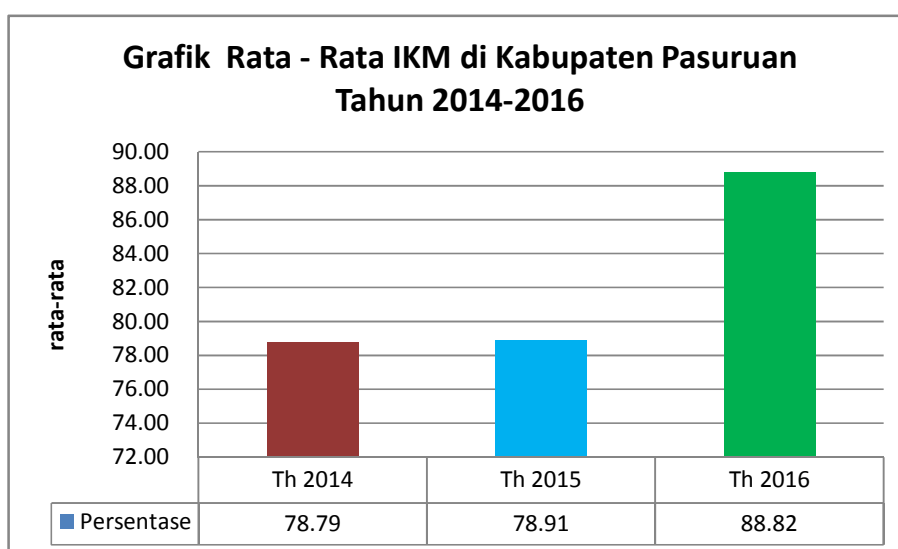
kesehatan di Puskesmas secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan - kualitas pelayanan publik bidang kesehatan selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit pelayanan kesehatan.

Rata-rata IKM di Puskesmas se Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2015 rata-ratanya 78,91 menjadi 88.82% di tahun 2016, target rata-rata IKM 70

Tabel 11. Rata-rata Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan tahun 2014-2016 di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Jml IKM	jml Pusk	Persentase
Th 2014	2,600	33	78.78
Th 2015	2,604	33	78.91
Th 2016	2,931	33	88.82
Target			70.00

Rata-rata Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 11  
Sumber : Laporan Bidang Yankes

### C. Realisasi Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2016 sebagai berikut :

Keseluruhan Realisasi per kegiatan dari Dinas Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Target /Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.2	Retribusi Daerah	11.710.117.714	10.347.628.938	88,36
4.1.4	JKN Puskesmas	52.113.897.000	53.124.415.437	101,94
	Jumlah	<b>63.824.014.714</b>	<b>63.472.044.375</b>	<b>99,45</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 secara keseluruhan tercapai 88,36 % yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan (Tindakan, Persalinan dan Rawat Inap Pelayanan Kesehatan ) sebesar Rp. **10.347.628.938,-** dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (JKN kapitasi puskesmas ) sebesar Rp. **53.124.415.437,00**

#### 2. Target /Anggaran dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi belanja tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### a. Belanja keseluruhan

NO	Uraian	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
----	--------	-------------	----------------	---

1	Dinas	199.989.765.192,38	184.462.665.970,00	92,24
2	Puskesmas	117.980.072.575,54	74.400.323.524,00	63,06
Total		317.969.837.767,92	258.862.989.494,00	81,41

## b. Rincian Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA (LANGSUNG + TDK LANGSUNG)</b>	<b>317.969.837.767,92</b>	<b>258.862.989.494,00</b>	<b>81,41</b>
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>67.046.848.098,38</b>	<b>64.447.506.934,00</b>	<b>96,12</b>
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	250.922.989.669,54	194.415.482.560,00	77,48
a	<b>BELANJA LANGSUNG DINAS</b>	<b>132.942.917.094,00</b>	<b>120.015.159.036,00</b>	<b>90,28</b>
	Belanja Pegawai	7.521.120.500,00	5.054.437.500,00	67,20
	Belanja Barang dan Jasa	20.385.452.394,00	17.099.632.674,00	83,88
	Belanja Modal	105.036.344.200,00	97.861.088.862,00	93,17
b	<b>BELANJA LANGSUNG PUSKESMAS</b>	117.980.072.575,54	74.400.323.524,00	63,06
	Belanja Pegawai	4.890.820.000,00	4.824.404.857,00	98,64
	Belanja Barang dan Jasa	87.936.197.442,54	59.240.124.560,00	67,37
	Belanja Modal	25.153.055.133,00	10.284.123.287,00	41,09

## c. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
102010000	Belanja Tidak Langsung	<b>67.106.748.098,38</b>	<b>64.481.410.350,00</b>	<b>93,36</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>1020101</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>8.542.165.400,00</b>	<b>6.371.837.365,00</b>	<b>74,59</b>
102010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.022.400,00	177.919.080,00	68,95
102010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	326.400.000,00	321.449.200,00	98,48
102010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.700.000,00	70.498.175,00	99,71
102010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	146.000.000,00	132.128.100,00	90,50
102010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	16.800.000,00	98,82
102010114	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.500.000,00	16.400.000,00	99,39
102010117	Penyediaan Makanan dan Minuman	114.823.500,00	114.778.000,00	99,96

102010118	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	277.415.000,00	215.632.810,00	<b>77,73</b>
102010119	Penyediaan Jasa Perkantoran	4.083.410.500,00	2.212.210.000,00	<b>54,18</b>
102010120	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	27.280.000,00	27.280.000,00	<b>100,00</b>
102010123	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK)	749.614.000,00	667.806.700,00	<b>89,09</b>
102010124	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBG)	2.455.000.000,00	2.398.935.300,00	<b>97,72</b>
<b>1020102</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>22.409.640.800</b>	<b>20.858.973.268</b>	<b>93,08</b>
102010203	Pembangunan Gedung Kantor	20.500.000.000	19.596.062.200,00	<b>95,59</b>
102010203	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	539.000.000	516.708.000,00	<b>95,86</b>
102010210	Pengadaan Mebelair	73.575.000	58.127.000,00	<b>79,00</b>
102010211	Pengadaan Peralatan Kantor	113.714.550	82.641.985,00	<b>72,67</b>
102010222	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.800.000,00	<b>99,00</b>
102010224	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	289.689.000	144.792.683,00	<b>49,98</b>
102010230	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	70.500.000	42.975.500,00	<b>60,96</b>
102010231	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Tangga	34.100.000	33.800.000,00	<b>99,12</b>
102010241	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas	378.856.500	364.065.900,00	<b>96,10</b>
102010246	Perencanaan Pengadaan Tanah	14.040.000	-	<b>0,00</b>
102010247	Persiapan Pengadaan Tanah	13.800.000	-	<b>0,00</b>
102010248	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	203.750.000	-	<b>0,00</b>
102010249	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	31.530.000	-	<b>0,00</b>
102010251	Perencanaan Pengadaan Tanah (PBG)	75.293.250	-	<b>0,00</b>
102010252	Persiapan Pengadaan Tanah (PBG)	51.792.500	-	<b>0,00</b>
102010203	Pembangunan Gedung Kantor	20.500.000.000	19.596.062.200,00	<b>95,59</b>
<b>1020105</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>473.920.000,00</b>	<b>418.396.350,00</b>	<b>88,28</b>
102010501	Pendidikan dan Pelatihan Formal	300.000.000,00	253.418.000,00	<b>84,47</b>
102010503	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	173.920.000,00	164.978.350,00	<b>94,86</b>
<b>1020115</b>	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>4.502.876.000,00</b>	<b>4.396.660.330,00</b>	<b>97,64</b>
102011501	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.462.765.000,00	1.452.445.220,00	<b>99,29</b>
102011504	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi	229.688.500,00	190.894.090,00	<b>83,11</b>

	Komunitas dan Rumah Sakit			
102011505	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	116.745.000,00	98.135.344,00	<b>84,06</b>
102011507	Pengadaan Alat Kesehatan Kawasan Industri Rokok	777.500,00	-	<b>0,00</b>
102011508	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan DAK	1.380.050.000,00	1.379.921.476,00	<b>99,99</b>
102011509	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan PBG	1.312.850.000,00	1.275.264.200,00	<b>97,14</b>
<b>1020116</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>4.957.993.344,00</b>	<b>4.002.914.783,00</b>	<b>80,74</b>
102011602	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	150.291.000,00	142.683.750,00	<b>94,94</b>
102011609	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	598.289.500,00	390.777.304,00	<b>65,32</b>
102011614	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	376.631.500,00	155.559.750,00	<b>41,30</b>
102011617	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (PBG)	300.000.000,00	294.925.000,00	<b>98,31</b>
102011618	Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah(Jamkesda) PBG	250.000.000,00	-	<b>0,00</b>
102011626	Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah(Jamkesda)	455.316.618,00	385.892.193,00	<b>84,75</b>
102011627	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BPJS	2.134.554.726,00	1.953.258.036,00	<b>91,51</b>
102011628	Pengembangan PONKESDES & PUSTU Layanan Gawat Darurat	692.910.000,00	679.818.750,00	<b>98,11</b>
<b>1020119</b>	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>1.684.165.500,00</b>	<b>1.454.660.072,00</b>	<b>86,37</b>
102011901	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	554.092.900,00	520.171.872,00	<b>93,88</b>
102011902	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	133.448.000,00	129.068.750,00	<b>96,72</b>
102011903	Peningkatan Pemanfaatna Sarana Kesehatan	421.994.600,00	322.217.450,00	<b>76,36</b>
102011907	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (PBG)	300.000.000,00	214.527.000,00	<b>71,51</b>
102011908	Peningkatan Pemanfaatna Sarana Kesehatan (DAK)	124.630.000,00	120.475.000,00	<b>96,67</b>
102011909	Peningkatan Pemanfaatna Sarana Kesehatan (BANTUAN PROP)	150.000.000,00	148.200.000,00	<b>98,80</b>
<b>1020120</b>	<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>	<b>1.567.174.000,00</b>	<b>1.385.150.393,00</b>	<b>88,39</b>
102012002	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	507.551.000,00	473.780.313,00	<b>93,35</b>
102012003	Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	59.623.000,00	48.271.250,00	<b>80,96</b>
102012007	Pemberian Tambahan Makanan dan	1.000.000.000,00	863.098.830,00	<b>86,31</b>

	Vitamin (PBG)			
<b>1020121</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>302.304.500,00</b>	<b>255.692.211,00</b>	<b>84,58</b>
102012101	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	229.229.500,00	193.342.525,00	<b>84,34</b>
102012103	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	73.075.000,00	62.349.686,00	<b>85,32</b>
<b>1020122</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>	<b>3.608.150.000</b>	<b>2.982.236.858</b>	<b>82,65</b>
102012201	Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk	433.110.000,00	303.143.200,00	<b>69,99</b>
102012205	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	195.000.000,00	180.138.685,00	<b>92,38</b>
102012208	Peningkatan Imunisasi	187.640.000,00	161.805.448,00	<b>86,23</b>
102012209	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah	167.400.000,00	152.559.400,00	<b>91,13</b>
102012212	Pelayanan Penanggulangan Penyakit TB	435,782,750.00	416,532,350.00	95.58
102012213	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	61,061,000.00	60,155,700.00	98.52
102012210	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan pemberantasan penyakit	1.200.000.000,00	1.034.398.500,00	<b>86,20</b>
102012213	Pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis	125.000.000,00	113.794.100,00	<b>91,04</b>
102012215	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (PBG)	300.000.000,00	278.200.125,00	<b>92,73</b>
102012216	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah (PBG)	1.000.000.000,00	758.197.400,00	<b>75,82</b>
102012210	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan pemberantasan penyakit	1.200.000.000,00	1.034.398.500,00	<b>86,20</b>
<b>1020125</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>	<b>4.970.632.500</b>	<b>4.258.817.020</b>	<b>85,68</b>
102012501	Pembangunan Puskesmas	500.000.000,00	415.616.000,00	<b>83,12</b>
102012521	Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu	1.461.322.500,00	1.410.179.600,00	<b>96,50</b>
102012524	Pembangunan Polindes	458.930.000,00	407.810.000,00	<b>88,86</b>
102012525	Rehabilitasi Polindes	1.512.170.000,00	1.447.039.100,00	<b>95,69</b>
102012527	Pengadaan alkes puskesmas dan jaringannya	1.038.210.000,00	578.172.320,00	<b>55,69</b>
102012501	Pembangunan Puskesmas	500.000.000,00	415.616.000,00	<b>83,12</b>

<b>1020130</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>	<b>384.932.500,00</b>	<b>379.997.877,00</b>	<b>98,72</b>
102013001	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	84.932.500,00	81.494.877,00	<b>95,95</b>
102013008	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PBG)	300.000.000,00	298.503.000,00	<b>99,50</b>
<b>1020132</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>	<b>1.194.373.900,00</b>	<b>1.062.712.764,00</b>	<b>88,98</b>
102013204	Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi	405.000.000,00	345.237.800,00	<b>85,24</b>
102013205	Pelayanan Kesehatan Anak	39.373.900,00	37.583.400,00	<b>95,45</b>
102013206	Pelayanan Kesehatan Anak (PBG)	350.000.000,00	331.669.000,00	<b>94,76</b>
102013207	Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi (PBG)	400.000.000,00	348.222.564,00	<b>87,06</b>
<b>1020133</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN</b>	<b>1.348.826.000,00</b>	<b>454.540.700,00</b>	<b>33,70</b>
102013301	Pelaksanaan Manajemen Kesehatan	357.958.000,00	212.024.200,00	<b>59,23</b>
102013302	Pelaksanaan Manajemen Kesehatan (DAK)	990.868.000,00	242.516.500,00	<b>24,48</b>
<b>1020134</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>76.995.762.650,00</b>	<b>71.732.569.045,00</b>	<b>93,16</b>
102013413	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok untuk Pengadaan Obat dan perbekalan Puskesmas	2.145.609.650,00	2.145.609.650,00	<b>100,00</b>
102013414	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok untuk Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	7.303.454.469,00	7.303.454.448,00	<b>100,00</b>
102013415	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok untuk Pengadaan Ambulance	7.494.248.000,00	7.478.128.000,00	<b>99,78</b>
102013417	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok untuk Pembangunan Puskesmas	1.636.527.500,00	1.636.527.500,00	<b>100,00</b>
102013420	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok untuk Pelayanan dan Penanggulangan penyakit TB	439.903.750,00	197.312.500,00	<b>44,85</b>

102013421	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Output Pengadaan obat dan perbekalan kesh))	854.390.350,00	653.736.550,00	<b>76,51</b>
102013422	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Output Pengadaan alat kesh)	11.036.135.331,00	10.032.081.197,00	<b>90,90</b>
102013423	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Output Pengadaan mobil ambulance/pusling/puskel/pelayanan)	23.564.350.000,00	22.286.155.000,00	<b>94,58</b>
102013424	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Output Pengadaan tanah)	152.925.100,00	-	<b>0,00</b>
102013425	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Output Pembangunan Puskesmas)	20.545.113.500,00	18.465.410.200,00	<b>89,88</b>
102013427	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Output Rehabiliatsi Puskesmas)	200.000.000,00	-	<b>0,00</b>
102013431	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Output Rehabiliatsi Puskesmas Pembantu)	1.623.105.000,00	1.534.154.000,00	<b>94,52</b>
	<b>JUMLAH DINAS</b>	132.939.797.094,00	120.020.134.036,00	<b>90,28</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN PUSKESMAS	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>1020116</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>19,252,905,465</b>	<b>14,667,357,036</b>	<b>76.18</b>
102011620	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Purwodadi	1.127.926.935	1.035.122.050	<b>91,77</b>
102011621	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Nongkojajar	422.098.143	281.849.457	<b>66,77</b>
102011622	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sumberpitu	109.211.000	65.548.704	<b>60,02</b>
102011623	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Puspo	105.550.000	75.956.930	<b>71,96</b>



102011624	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tosari	103.270.000	92.343.501	<b>89,42</b>
102011625	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lumbang	161.353.612	115.310.800	<b>71,46</b>
102011626	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pasrepan	152.191.890	128.433.471	<b>84,39</b>
102011627	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kejayan	128.197.260	72.042.594	<b>56,20</b>
102011628	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ambal-ambil	41.365.800	20.377.868	<b>49,26</b>
102011629	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonorejo	177.536.700	113.798.981	<b>64,10</b>
102011630	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Purwosari	1.213.266.600	1.029.243.424	<b>84,83</b>
102011631	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangrejo	29.250.720	21.018.933	<b>71,86</b>
102011632	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Prigen	178.947.000	162.022.885	<b>90,54</b>
102011633	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulukandang	18.731.160	17.215.200	<b>91,91</b>
102011634	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sukorejo	254.182.500	189.029.866	<b>74,37</b>
102011635	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pandaan	792.000.000	755.809.934	<b>95,43</b>
102011636	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sebani	17.100.000	11.001.000	<b>64,33</b>
102011637	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gempol	586.317.600	567.194.018	<b>96,74</b>
102011638	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kepulungan	28.620.000	28.620.000	<b>100,00</b>
102011639	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Beji	346.225.950	321.375.803	<b>92,82</b>
102011640	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bangil	237.721.230	210.458.850	<b>88,53</b>
102011641	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Raci	82.620.000	81.242.985	<b>98,33</b>
102011642	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rembang	102.810.780	94.815.291	<b>92,22</b>
102011643	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	66.228.981	45.827.202	<b>69,20</b>
102011644	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngempit	569.471.400	475.081.676	<b>83,43</b>
102011645	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pohjentrek	65.340.000	39.365.934	<b>60,25</b>
102011646	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondangwetan	730.026.000	461.284.715	<b>63,19</b>
102011647	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rejoso	224.488.539	174.948.368	<b>77,93</b>
102011648	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Winongan	279.310.050	268.746.442	<b>96,22</b>
102011649	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Grati	1.192.067.550	986.761.070	<b>82,78</b>
102011650	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kedawungwetan	34.875.000	31.844.291	<b>91,31</b>
102011651	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	862.329.243		<b>51,24</b>

	Puskesmas Lekok		441.876.727	
102011652	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Nguling	555.594.300	505.892.048	<b>91,05</b>
102011653	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Purwodadi	268.144.580	208.214.549	<b>77,65</b>
102011654	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Nongkojajar	191.203.500	167.518.518	<b>87,61</b>
102011655	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Sumberpitu	188.330.600	172.674.572	<b>91,69</b>
102011656	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Puspo	320.692.100	252.147.159	<b>78,63</b>
102011657	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Tosari	357.149.300	312.322.537	<b>87,45</b>
102011658	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Lumbang	127.992.000	117.464.958	<b>91,78</b>
102011659	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Pasrepan	241.061.600	200.339.931	<b>83,11</b>
102011660	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Kejayan	201.224.700	197.280.796	<b>98,04</b>
102011661	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Ambal-ambil	319.240.400	209.750.868	<b>65,70</b>
102011662	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Wonorejo	273.007.500	257.740.682	<b>94,41</b>
102011663	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Purwosari	277.034.720	260.728.768	<b>94,11</b>
102011664	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Karangrejo	291.621.800	243.638.361	<b>83,55</b>
102011665	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Prigen	202.700.100	185.404.161	<b>91,47</b>
102011666	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Bulukandang	309.256.000	204.481.754	<b>66,12</b>
102011667	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Sukorejo	305.242.700	262.938.212	<b>86,14</b>
102011668	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Pandaan	331.119.270	326.809.940	<b>98,70</b>
102011669	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Sebani	303.493.400	252.558.444	<b>83,22</b>
102011670	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Gempol	323.233.960	302.771.622	<b>93,67</b>
102011671	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Kepulungan	255.220.100	210.036.226	<b>82,30</b>
102011672	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Beji	388.803.835	353.914.618	<b>91,03</b>
102011673	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Bangil	193.978.200	175.225.517	<b>90,33</b>
102011674	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Raci	370.658.650	312.865.981	<b>84,41</b>
102011675	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Rembang	220.987.500	208.040.246	<b>94,14</b>
102011676	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Kraton	230.186.000	216.368.000	<b>94,00</b>
102011677	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Ngempit	245.038.150	238.814.464	<b>97,46</b>
102011678	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Pohjentrek	207.055.800	195.317.206	<b>94,33</b>

102011679	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Gondangwetan	291.722.800	270.788.283	<b>92,82</b>
102011680	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Rejoso	215.270.800	189.992.852	<b>88,26</b>
102011681	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Winongan	247.293.400	226.040.361	<b>91,41</b>
102011682	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Grati	207.903.700	201.791.994	<b>97,06</b>
102011683	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Kedawungwetan	213.876.200	197.326.936	<b>92,26</b>
102011684	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Lekok	230.230.200	202.546.880	<b>87,98</b>
102011685	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Nguling	205.842.800	174.398.402	<b>84,72</b>
102011686	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPTD Labkesda	164.973.600	163.412.753	<b>99,05</b>
102011687	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPTD POPPK	381.356.000	356.434.514	<b>93,47</b>
102011688	Peningkatan Kesehatan di Jamin Pemda di UPTD Labkesda	799.480.700	772.098.838	<b>96,58</b>
102011694	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Lumbang Dana Pajak Rokok	155.000.000	133.002.500	<b>85,81</b>
102011698	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Wonorejo Dana Pajak Rokok	155.000.000	135.645.000	<b>87,51</b>
102011601	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Prigen Dana Pajak Rokok	77.730.000	65.178.500	<b>83,85</b>
102011603	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Sukorejo Dana Pajak Rokok	155.000.000	134.356.000	<b>86,68</b>
102011604	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Pandaan Dana Pajak Rokok	80.500.000	60.581.000	<b>75,26</b>
102011608	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Beji Dana Pajak Rokok	155.000.000	130.167.500	<b>83,98</b>
102011609	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Bangil Dana Pajak Rokok	80.350.000	69.241.000	<b>86,17</b>
102011611	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Rembang Dana Pajak Rokok	155.000.000	130.167.500	<b>83,98</b>
102011612	Pelayanan Kesehatan dijamin Pemda di Puskesmas Kraton Dana Pajak Rokok	79.300.000	67.949.500	<b>85,69</b>
<b>1020135</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>52,892,939,160</b>	<b>28,578,814,837</b>	<b>54.03</b>
102013501	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Purwodadi	4.009.181.332	2.162.334.550	<b>53,93</b>
102013502	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas	1.414.065.370	710.856.305	<b>50,27</b>

	Nongkojajar			
102013503	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Sumberpitu	721.546.836	499.037.337	<b>69,16</b>
102013504	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Puspo	2.494.887.882	1.299.068.590	<b>52,07</b>
102013505	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Tosari	1.008.409.338	615.393.484	<b>61,03</b>
102013506	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Lumbang	2.884.273.065	1.472.747.272	<b>51,06</b>
102013507	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Pasrepan	3.832.255.408	2.092.460.555	<b>54,60</b>
102013508	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Kejayan	2.589.999.546	1.700.920.524	<b>65,67</b>
102013509	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Ambal ambil	1.249.987.782	664.683.575	<b>53,18</b>
102013510	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Wonorejo	4.386.246.261	2.376.720.629	<b>54,19</b>
102013511	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Purwosari	4.023.410.084	2.607.418.418	<b>64,81</b>
102013512	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Karangrejo	748.193.439	426.046.244	<b>56,94</b>
102013513	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Prigen	1.306.421.201	955.859.735	<b>73,17</b>
102013514	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Bulukandang	722.424.815	559.035.592	<b>77,38</b>
102013515	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Sukorejo	2.978.516.531	1.537.591.551	<b>51,62</b>
102013516	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Pandaan	3.613.585.600	2.585.069.326	<b>71,54</b>
102013517	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Sebaní	382.734.177	234.281.541	<b>61,21</b>
102013518	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Gempol	3.408.123.540	2.053.219.342	<b>60,24</b>
102013519	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Kepulungan	812.682.545	624.290.158	<b>76,82</b>
102013520	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Beji	3.344.393.447	1.850.386.399	<b>55,33</b>
102013521	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Bangil	2.304.737.930	1.247.902.255	<b>54,15</b>
102013522	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Raci	733.736.396	574.618.176	<b>78,31</b>
102013523	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Rembang	3.236.404.812	2.025.469.971	<b>62,58</b>
102013524	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Kraton	2.479.463.025	1.452.650.803	<b>58,59</b>
102013525	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Ngempit	2.578.216.293	1.679.555.129	<b>65,14</b>
102013526	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas	1.382.501.649	1.065.107.072	<b>77,04</b>

	Pohjentrek			
102013527	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Gondang Wetan	3.390.909.941	2.312.707.142	<b>68,20</b>
102013528	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Rejoso	2.590.318.574	1.410.102.188	<b>54,44</b>
102013529	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Winongan	4.095.731.610	2.103.031.681	<b>51,35</b>
102013530	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Grati	4.300.236.150	2.847.803.186	<b>66,22</b>
102013531	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Kedawungwetan	1.472.449.898	798.412.360	<b>54,22</b>
102013532	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Lekok	5.568.576.393	2.719.446.494	<b>48,84</b>
102013533	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Nguling	4.570.892.098	2.625.749.769	<b>57,45</b>
102013534	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Purwodadi	398.901.000	279.060.850	69,96
102013535	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Nongkojajar	420.899.000	188.552.000	44,80
102013536	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Sumberpitu	339.095.000	156.705.000	46,21
102013537	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Puspo	337.157.000	258.197.750	76,58
102013538	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Tosari	303.287.000	213.748.000	70,48
102013539	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Lumbang	310.875.000	171.714.400	55,24
102013540	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Pasrepan	320.962.000	193.354.000	60,24
102013541	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Kejayan	323.047.000	202.902.000	62,81
102013542	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas ambil-ambil	260.033.000	135.147.500	51,97
102013543	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas wonorejo	340.248.000	179.962.400	52,89
102013544	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Purwosari	334.625.000	177.547.500	53,06
102013545	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Karangrejo	311.189.000	152.046.800	48,86
102013546	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Prigen	402.273.000	272.395.300	67,71
102013547	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Bulukandang	270.107.000	187.663.500	69,48
102013548	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Sukorejo	420.267.000	174.044.000	41,41
102013549	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Pandaan	425.447.000	276.535.600	65,00
102013550	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Sebani	284.925.000	109.454.800	38,42
102013551	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Gempol	378.592.000	171.233.000	45,23

102013552	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Kepulungan	336.039.000	104.178.000	31,00
102013553	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Beji	367.665.000	130.043.000	35,37
102013554	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Bangil	344.040.000	183.126.000	53,23
102013555	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Raci	463.158.000	272.106.700	58,75
102013556	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Rembang	376.044.000	173.697.000	46,19
102013557	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Kraton	356.862.000	185.958.000	52,11
102013558	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Ngempit	356.697.000	181.404.000	50,86
102013559	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Pohjentrek	359.516.000	107.033.000	29,77
102013560	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Gondang Wetan	334.430.000	142.472.500	42,60
102013561	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Rejoso	345.647.000	122.975.250	35,58
102013562	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Winongan	314.710.000	193.910.000	61,62
102013563	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Grati	313.883.000	209.933.500	66,88
102013564	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Kedawung Wetan	260.327.000	125.771.900	48,31
102013565	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Lekok	328.242.000	124.348.500	37,88
102013566	Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas Nguling	314.638.000	105.175.000	33,43
	JUMLAH PUSKESMAS	117.980.072.575,54	74.400.323.524,00	<b>63,06</b>
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG DINAS DAN PUSK</b>		<b>192,450,849,227</b>	<b>136,975,810,924</b>	<b>71.17</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang realisasi belanjanya tidak mencapai target, yaitu karena disebabkan beberapa hal :

- Penyerapan dana kapitasi yang dialokasikan untuk puskesmas tidak terealisasi optimal dikarenakan di Puskesmas masih banyak yang belum mempunyai PPK yang bersertifikat proses pengadaan sulit

dilaksanakan tindak lanjut yang dilakukan adalah mengusulkan pelatihan PPK dimasing – masing puskesmas,

- Kegiatan pembangunan rumah dinas untuk kecamatan gempol tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lahan yang akan digunakan diperuntukkan untuk lokasi industri. Tindak lanjut yang dilakukan adalah mencari lokasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Kegiatan pembayaran premi jamkesda tidak dapat dilaksanakan yang dikarenakan proses integrasi data peserta Jamkesda ke BPJS belum selesai dilakukan. Tindak lanjut dilakukan penetapan nama – nama peserta Jamkesdayang diintegrasikan ke peserta BPJS sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dana alokasi khusus non fisik untuk jaminan persalinan tidak dapat dilaksanakan karena petunjuk teknis dari kementerian kesehatan tidak sesuai dengan kondisi di kabupaten Pasuruan. Tindak lanjut mengusulkan Anggaran pada APBD sedapat mungkin menyesuaikan dari petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
- Pengadaan Tanah Rencana Relokasi Puskesmas di Grati.(dari dana bagi hasil cukai dan tembakau) tidak dilaksanakan karena tidak tercapai kesepakatan harga dengan pemilik tanah tindak lanjut yang dilakukan mengalihkan lokasi ke Aset Pemda (Ex. Rencana sub terminal dishub di desa Trewung ).
- Beberapa kegiatan yang tidak terserap optimal dikarenakan efesiensi.



Berkembangnya program pembangunan terutama di bidang kesehatan serta bertambahnya kewenangan daerah termasuk dalam bidang kesehatan, maka semakin banyak pula informasi yang perlu dikuasai dan diketahui baik mengenai hasil maupun manfaat kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Melalui laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang hasil kegiatan dan program Dinas Kesehatan selama tahun 2016.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran penetapan kinerja sebanyak 11 indikator yang tercapai 6 indikator (72.73%) sedangkan 5 indikator belum tercapai. Realisasi anggaran mencapai 71,17% untuk belanja langsung, sedangkan belanja tidak langsung mencapai 93,36%.

Demikian laporan kinerja tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang kemudian ditindak lanjuti dengan rencana kegiatan 2017. Semoga berguna dan bermanfaat.

Pasuruan, Februari 2017  
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASURUAN**

**dr. AGUNG BASUKI, M.Kes.**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 196005041989021002**